

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN JAKSA
DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PERDATA
BERDASAR PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1991
DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO

Nur Akhirman ¹⁾ dan Nugroho Amien Soetiyarto ²⁾

INTISARI

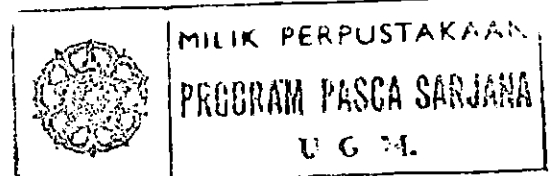
Penelitian tentang “Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Perdata Berdasar Pasal 27 Undang-undang Nomor 27 Tahun 1991 di Kejaksaan Negeri Purwokerto” bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum perdata yang dilakukan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam prakteknya berdasar pada undang-undang nomor 5 tahun 1991 dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari studi kepustakaan, dan penelitian lapangan dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan hasil penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan.

Keberadaan kejaksaan dalam bidang perkara perdata sebenarnya bukanlah hal yang baru, tetapi itu sudah diatur sejak tahun 1922 dalam ketentuan *staatblad* 1922 nomor 522 dan dirumuskan kembali dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan dalam prakteknya baru terlaksana sejak dikeluarkannya Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut dalam susunan organisasi Kejaksaan RI dibentuk satu unit organisasi yang berkaitan dengan perdata yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atau dikenal juga dengan sebutan JAMDATUN. Sejak itu peranan kejaksaan dalam bidang perdata menjadi nyata, beberapa kasus perdata yang melibatkan instansi pemerintah diselesaikan dengan baik oleh kejaksaan. Tujuan dibentuknya JAMDATUN sendiri adalah menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan melindungi kepentingan umum. Dalam Pasal 24 Keppres Nomor 55 Tahun 1991 dinyatakan bahwa JAMDATUN mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Jaksa, Penegakan Hukum Perdata dan Instansi Pemerintah.

- 1) SH, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Purwokerto
- 2) SH.,MSi, Staf Pengajar Fakultas Hukum UGM.





Tinjauan yuridis tentang peranan jaksa dalam pelaksanaan penegakan hukum perdata berdasar Pasal 27

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 di Kejaksaan Negeri Purwokerto
THE OBSERVATION ON THE ROLE OF PROSECUTOR
IN PRIVATE LAW ENFORCEMENT

BASED ON THE ARTICLE 27 OF THE ORDINANCE NO. 5, 1991
IN STATE ATTORNEY OF PURWOKERTO

By Nur Akhirman¹ and Nugroho Amien Soetiyarto²

ABSTRACT

The research on The Role of Prosecutor in Civil Law Enforcement Based on the Article 27 of the Ordinance no 5/1991 in the District Attorney of Purwokerto aims to know how the Civil Law enforcement was carried out by prosecutors in the District attorney, based on the Ordinance no 5/1991, and the obstacles encountered in its implementation.

This research was normative juridical with the library and field researches. The library research was conducted by collecting data from some literatures while the field study was through direct observation to obtain appropriate data related to the issues studied. The data obtained from both studies then were analyzed qualitatively to get descriptive data.

The existence of Public Attorney in the cases of civil law is actually not a new thing. It has been stipulated since 1922, on the regulation Staatblad 1922 Number 522 and was reformulated on the Ordinance Number 5 Year 1991 on Attorney. But in practice, it had just been implemented since the issuance of the Presidential Decree No. 55 Year 1991 on The Organization Structure and Work Order of The Republic of Indonesian Attorney. Then in the organization structure of Attorney of the Republic of Indonesia, an organization unit related to civil law led by "Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara" (Young Attorney General of Civil and State Administration) or best known as JAMDATUN was established. Since then, the role of Public Attorney in the field of civil was realized. Some civil cases involving government institutions were successfully settled by the Attorney.

The purpose of the establishment of JAMDATUN is to ensure the law enforcement, to save the country's wealth, to build the government dignity and to protect public interests. In the article 24 of the Presidential Decree No. 55/1991 it was stated that JAMDATUN has a duty and authority to carry out the law enforcement, assistance, consideration and service to the government and state institutions in the field of civil and state administration, and to build the dignity of government based on the regulation of legislation.

Keywords: Prosecutor, Private Law Enforcement and Government Instance.



¹ SH, Prosecutor in State Attorney of Purwokerto

² SH, Msi, Educator staff of Law Faculty of Gadjah Mada University